



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
RENSTRA

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024, adalah ahsil Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2015-2019 serta beberapa aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kemennterian Agama Kabupaten Donggala menggunakan metode dan kerangka berfikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan. Renstra ini telah mengacu pada tujuan tersebut yang selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan kedalam berbagai sasaran kegiatan yang selaras dengan kegiatan pada Renstra Unit Eselon II Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan di bidang agama.

Donggala, 29 Oktober 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Donggala,

H. RUSDIN, S.Ag, MM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1019 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Prioritas Nasional;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemnagunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

SP

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala 2020-2024 sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
 1. Menyediakan bahan/materi/data untuk keperluan penyusunan Rencana Stategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024
 2. Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan *sa* secara berjenjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2020



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
AGAMA KABUPATEN DONGGALA
NOMOR/0/9TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
DONGGALA 2020-2024

Susunan Personalia Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024

1. Penanggungjawab : Rusdin (Kepala Kantor)
2. Ketua : Sarina Unok (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
3. Sekretaris : Mulkin (Analisis Kepegawaian);
4. Anggota :
 - 1) Abidin (Kepala Seksi Pendidikan Islam);
 - 2) Darwin Panessai (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam);
 - 3) Burhan Munawir (Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah);
 - 4) Jotje Djemi Lombogia (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen);
 - 5) Usman (Penyelenggara Zakat dan Wakaf);
 - 6) I Nyoman Dana (Penyelenggara Hindu);
 - 7) Mohamad Yannas (Pelaksana pada Urusan Keuangan);
 - 8) Jafar Shadiq (Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam);
 - 9) Ardiansyah (Pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah);
 - 10) Marzuki (Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam);
 - 11) Syarfah Latuconsina (Pelaksana pada Urusan Kepegawaian);
 - 12) Ostin Suryaningsih Todaga (Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	
SK TIM PENYUSUN RENSTRA	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	
1.2 Potensi dan Permasalahan	
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
2.1 Tujuan Kementerian Agama Republik Indonesia	
2.2 Sasaran Kementerian Agama Kabupaten Donggala	
BAB III TAREGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Target Kinerja	
3.2 Kerangka Pendanaan	
BAB IV PENUTUP	
Lampiran I	Matriks Kinerja dan Pendanaan 7 Program
Lampiran II	Matriks Kinerja dan Pendanaan 4 Program
Lampiran III	Tim Penyusun Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala 2020-2024

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penyuluh Agama dan Rasio menurut Agama di Donggala
- Gambar 2 Dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Donggala
- Gambar 3 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019
- Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah
- Gambar 5 Pemberian Bantuan Rumah Ibadah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
- Gambar 6 Jumlah Dana Zakat dan Tanah Wakaf Bersertifikat yang Dikelola Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2015– 2019
- Gambar 7 Grafik APK RA/Pratama Widya Pasraman Tahun 2015-2019
- Gambar 8 Grafik APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Tahun 2015-2019
- Gambar 9 Grafik APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman Tahun 2015-2019
- Gambar 10 Grafik APK MA/Ulya/SMTK/SMAK Tahun 2015-2019
- Gambar 11 Grafik APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman Tahun 2015-2019
- Gambar 12 Grafik APM MTs/Wustha/SMPTK Tahun 2015-2019
- Gambar 13 Grafik APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman Tahun 2015-2019
- Gambar 14 Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MTs/SMPTK Tahun 2015-2019
- Gambar 15 Grafik Rata-Rata Nilai Ujian Nasional MA/SMAK Tahun 2015-2019

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2015-2019
- Tabel 2 Jumlah PPIU di Kabupaten Donggala yang Ditetapkan Izin Operasional Tahun 2016-2019
- Tabel 3 Hasil Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2015-2019
- Tabel 4 Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019
- Tabel 5 Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah
- Tabel 6 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan antar Umat Beragama Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/ Masalah
- Tabel 7 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/ Masalah
- Tabel 8 Pengukuhan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/ Masalah
- Tabel 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Potensi Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/ Masalah Peningkatan Akses Layanan Pendidikan
- Tabel 10 Potensi, Tantangan, Kelemahan, dan Ancaman/Masalah Agama dan Keagamaan
- Tabel 11 Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020
- Tabel 12 Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2021-2024

DAFTAR SINGKATAN

ASN	Aparatur Sipil Negara
ATS	Anak Tidak Sekolah
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BMN	Barang Milik Negara
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPIH	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPS	Bank Penerima Setoran
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Dikdas	Pendidikan Dasar
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kepmen	Keputusan Menteri
KKG	Kelompok Kerja Guru
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
LEMSAKTI	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MoU	Memorandum of Understanding
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MTQ	Musabaqah Tilawatil Qur'an
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRG	Nomor Registrasi Guru
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PESPARANI	Pesta Paduan Suara Gerejani
PESPARAWI	Pesta Paduan Suara Gerejawi
PHU	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIP	Program Indonesia Pintar

PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPIU	Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
RRI	Radio Republik Indonesia
Renstra	Rencana Strategis
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluhan Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SISKOHAT	Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
SK	Surat Keputusan
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SS	Sasaran Strategis
STQ	Seleksi Tilawatil Qur'an
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK	Taman Kanak-Kanak
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
ZI	Zona Integritas
3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar

BAB I

PENDAHULUAN

Pembahasan dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian- capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat dimaksud terdapat dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan pada beberapa waktu dan kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Pada kondisi umum dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Kabupaten Donggala telah menyusun 7 (tujuh) Misi yang mendukungnya, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan & kualitas pengelolaan ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sasarannya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan;
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator : 1) meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Penyuluhan Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluhan agama dengan merekrut tenaga penyuluhan agama baik PNS maupun Non-PNS. Peningkatan jumlah penyuluhan Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi

dan kinerja penyuluhan agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan. Rasio penyuluhan dibandingkan jumlah umat beragama di Kabupaten Donggala adalah berikut:

Jumlah penduduk umat Islam Kab. Donggala : 275.409 Jiwa

Penyuluhan Agama Islam PNS : 6 Orang

Penyuluhan Agama Islam Non PN : 86 Orang

Rasio : 1 : 2.993 Orang

Jumlah penduduk umat Kristen Kab. Donggala : 20.748 Jiwa

Penyuluhan Agama Kristen PNS : - Orang

Penyuluhan Agama Kristen Non PN : 8 Orang

Rasio : 1 : 2.593 Orang

Jumlah penduduk umat Hindu Kab. Donggala : 9.212 Jiwa

Penyuluhan Agama Hindu PNS : 1 Orang

Penyuluhan Agama Hindu Non PN : 8 Orang

Rasio : 1 : 1.024

**Rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penyuluhan Agama dan
Rasio menurut Agama di Kabupaten Donggala
Tahun 2019**

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluhan agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk didalamnya para pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.1 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti MTQ, STQ, PESPARAWI, Utsawa Dharma Gita.

Di samping itu, berbagai peringatan Hari Besar Keagamaan pada Tingkat Kabupaten dan Festival Seni Budaya telah diselenggarakan, bekerja sama dengan lembaga seni dan pemerintah Kabupaten/daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Donggala
Tahun 2015-2019

No.	Unit Organisasi	Kegiatan Keagamaan	Volume Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Bimas Islam	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Donggala	3 kali	2015 (Kec.Sindue tobata) 2017 (Kec. Balaesan Tg) 2019 (Kec.Dampelas)
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kabupaten Donggala	2 kali	2016 (Kec.sindue tombusabora) 2018 (Kec. Sindue)
2	Bimas Kristen	Pesparawi Tingkat Kabupaten Donggala	1 kali	2016 Kecamatan Banawa Selatan
		Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)	1 kali	2018 (Banawa Selatan)
		Kelahiran Yesus Kristus (Natal)	4 Kali	- Dampelas Tahun 2015 - Pinembani Tahun 2016 - Rio Pakawa Tahun 2017 - Banawa Tahun 2018
3	Bimas Hindu	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Donggala	1 kali	2018 (Sojol)
		Festival Seni Keagamaan Hindu	1 kali	2019 (Dampelas)

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, 2020

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Donggala



Foto MTQ/STQ



Foto Pesparawi

Gambar 2
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Tingkat Kabupaten Donggala

1.1.1 Pengukuran Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Pada Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Kabupaten Donggala serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Donggala yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Dalam memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa:

(1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) Kabupaten; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang dilakukan Litbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Donggala yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi, (2) kesetaraan, (3) kerjasama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variable-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah tempat tinggal. Bahwa untuk mencapai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Donggala berada pada kategori tinggi, di atas rata-rata nasional yaitu 75. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Donggala berjalan dinamis. Namun walaupun indeks capaiannya sudah tinggi, tetapi masih perlu diwujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkat daerah (pada Kantor Urusan Agama Kecamatan), bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat Desa/Kelurahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), yang memperhitungkan faktor-faktor non keagamaan. Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerja sama di tengah masyarakat yang majemuk.

Peran serta seluruh komponen masyarakat juga sangat diperlukan, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah dan akan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, serta mengembangkan

budaya damai dan toleransi. Kegiatan penguatan kerukunan berupa: 1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; 2) peningkatan kapasitas sektor-sektor kerukunan umat beragama; 3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; 4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan 5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat/kultural.

Kementerian Agama Kabupaten Donggala juga telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut „aktor”, karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, *workshop*, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama, 2) peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, 3) pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan 4) penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai. Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

Kegiatan yang dilakukan berupa *workshop* dan dialog, yang telah diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala melalui berbagai kegiatan sepanjang tahun 2015-2019. Tahun 2016-2019 telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Hidup Rukun Tingkat SLTA/MA guna memberikan pemahaman tentang kerukunan beragama dan pendidikan multikultural, multi etnik, dan multibudaya sejak dini kepada para pelajar dalam rangka menciptakan hidup rukun dan damai di lingkup sekolah. Selain itu pada tahun 2017 dan 2019, telah dilaksanakan pula kegiatan Pembinaan Aktor-Aktor KUB dalam rangka penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan, dan kegiatan Dialog Lintas Agama dengan Berbagai Kalangan Masyarakat dan Profesi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sepanjang tahun 2015-2019 di tingkat kabupaten/kota sebagai forum diskusi bersama untuk memikirkan, merenungkan dan mendiskusikan mengenai permasalahan, kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam memelihara kerukunan antar umat beragama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa Kerukunan Umat Beragama. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dibentuk 1 Desa Kerukunan, yakni tahun 2017 di Desa Pani'i Kec. Dampelas Kabupaten Donggala



Gambar 4
Kegiatan Upaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Bekerjasama dengan Pihak Terkait (FKUB, PLRI dan Kesbangpol)

1.1.1.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Donggala, adalah fakta masyarakat Kabupaten Donggala yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan

semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama di Kabupaten Donggala.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama telah dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 melalui pembinaan wawasan multikultural bagi penyuluhan lintas agama dengan jumlah peserta orang.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluhan Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Donggala.

1.1.2.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya, fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Saat ini di wilayah Kabupaten Donggala telah tersedia 447 Masjid, 104 Mushola, 168 gereja Kristen, 1 gereja Katolik, 51 pura, dan 2 rumah ibadah Buddha.

1.1.2.2 Penyuluhan Agama yang Kompeten

Penyuluhan Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah

memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluhan agama dengan merekrut tenaga penyuluhan agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluhan agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluhan agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluhan Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok.

Penyuluhan agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2019, jumlah penyuluhan agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 5 orang, sedangkan penyuluhan agama Non PNS sebanyak 86 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluhan Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Islam 1 : 275.409 artinya 1 orang penyuluhan harus melayani 2.849 orang.

168 gereja Kristen, 2 gereja Katolik, Di lingkungan Kristen, tenaga penyuluhan non PNS berjumlah sebanyak 8 orang dengan rasio ketersediaan penyuluhan Agama Kristen dibandingkan dengan jumlah penduduk Kristen 1 : 964.

Saat ini tenaga penyuluhan agama Hindu berstatus PNS sebanyak 1 orang, dan Penyuluhan Non PNS agama Hindu berjumlah 8 orang (SK Kakanwil) dengan rasio ketersediaan penyuluhan Agama Hindu dibandingkan dengan jumlah penduduk Hindu 1 : 1.024.

Dengan jumlah penyuluhan agama yang belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala merekrut penyuluhan Non PNS yang berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluhan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluhan agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluhan agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluhan agama.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluhan agama sehingga penyuluhan dapat menjadi penyuluhan yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama,

kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Di samping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan. Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama.

1.1.2.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung layanan, tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki tanggung jawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinhah, bimbingan perkawinan dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA.

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif:

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP online dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000 calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya.

Jumlah kecamatan di Donggala berjumlah 16 kecamatan, dan gedung KUA yang ada berjumlah 11 unit. Dari jumlah tersebut, ada 3 gedung KUA yang rusak berat, dan 5 unit KUA pemekaran yang belum memiliki gedung. Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, hingga tahun 2019 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah

membangun 4 gedung balai nikah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.

1.1.2.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis al-Quran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah:

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan Nikah Rujuk;
- Pelaksanaan pelayanan Nikah Rujuk;
- Penasehatan dan konsultasi Nikah Rujuk;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan Nikah Rujuk;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Hingga tahun 2019 tercatat ada 17 penghulu yang tersebar di 16 KUA yang ada di wilayah Kabupaten Donggala. Jumlah penghulu yang ada masih terbilang kurang. Idealnya dalam setiap kecamatan terdapat tiga hingga lima penghulu yang bertugas di KUA. Untuk mengisi kekurangan penghulu ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sudah melakukan inpassing, yaitu memberikan pelatihan dan diklat kepada pegawai yang dianggap mampu menjadi penghulu, kemudian diberikan SK dan diangkat menjadi penghulu.

Untuk meningkatkan kualitas penghulu yang berintegrasi dan amanah, sepanjang tahun 2015-2019 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala menyelenggarakan berbagai kegiatan orientasi dan sosialisasi sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penghulu. Penghulu juga diharapkan bisa menjadi mentor pada program pendidikan sebelum menikah yang diadakan di KUA. Setiap penghulu dituntut memahami aturan yang

terkait tugas dan fungsinya, sehingga dalam memberi pelayanan tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan.

1.1.1.1 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Ibadah Umrah.

Secara hierarkis, penyelenggara haji meliputi penyelenggara haji tingkat pusat, penyelenggara haji tingkat provinsi, penyelenggara haji tingkat kabupaten atau kota, dan penyelenggara haji di Arab Saudi. Penyelenggara tingkat pusat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Penyelenggaraan haji tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai penanggung jawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji provinsi, dan dibantu Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris. Penyelenggaraan haji tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau walikota sebagai penanggungjawab dan koordinator, sedangkan pelaksanaan harian dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sebagai kepala staf penyelenggaraan ibadah haji kabupaten/kota, dan dibantu Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah sebagai sekretaris.

Jumlah jamaah haji Kabupaten Donggala yang diberangkatkan melalui Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urut kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.
- 2 Dengan diberlakukannya kebijakan *e-hajj* oleh Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat *e-reader*.
3. Sebelum pemberangkatan, jamaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyamanan dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jamaah haji, maka dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi administraif dan teknis.

Di bidang umrah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala telah melakukan pembinaan penyelenggaraan ibadah umrah melalui pelaksanaan pembinaan kelembagaan PPIU secara *online*. Penyusunan 9 (sembilan) regulasi diantaranya peraturan tentang Pembinaan, Bank Garansi, Pengawasan, Rekomendasi, dan Verifikasi. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan satuan kerja kabupaten/kota serta pemberdayaan penyuluh KUA. Kegiatan Pelayanan Perizinan PPIU secara elektronik yang terdiri atas permohonan izin operasional sebagai PPIU, perubahan data PPIU, dan pengajuan permohonan akreditasi.

1.1.3 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Lembaga keagamaan telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi penganut berbagai agama. Selain itu, lembaga keagamaan telah berhasil menghimpun dana sosial keagamaan yang tidak hanya untuk mendukung pendidikan keagamaan tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan umat, yang hasilnya dibeberapa lembaga sangat menggembirakan. Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan tersebut ternyata cukup besar hal tersebut dapat dilihat pada jumlah tanah wakaf tahun 2019 berjumlah 189 lokasi yang tersebar di wilayah Donggala. Dari sejumlah itu 153 lokasi telah berhasil disertifikasi dan yang belum bersertifikat berjumlah 36. Capaian target sertifikasi tanah wakaf belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan rencana karena: 1) proses sertifikasi membutuhkan waktu yang lama; 2) anggaran pengelolaan pengurusan sertifikasi yang disediakan belum mencakup jenis dana yang diperlukan.

wewenang Kementerian Agama terbatas hanya sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat KUA, sementara penyelesaian sertifikat selanjutnya berada

dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen. Melalui Penyelenggara Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana Punia melalui Badan Dharma Dana.

1.1.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: 1) meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; 2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.4.1 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Hasil capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Hasil Capaian Kinerja
2015	95,39%
2016	97,72%
2017	92,51%
2018	96%

Sumber: Aplikasi SAS pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten Donggala

Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan: 1) Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibanding dengan capaian kinerjanya; 2) Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil meningkat, dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan manajemen kinerja sektor publik pada Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah. Selain itu kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja yang meliputi

perencanaan kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal dipenuhi secara lengkap.

1.1.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan yaitu:

- a. Terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (pola pikir dan budaya kerja aparatur);
- b. Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*);
- c. Terlaksananya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- d. Dihasilkannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- e. Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Meningkatnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- h. Meningkatnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Tahun 2018 memperoleh skor 61,60% dan di tahun 2019 meningkat di angka 86,3%.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas “evidence based” melainkan “*impact based*”.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala.

Dengan 10 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, beberapa KUA dan Madrasah mulai mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk 1 unit PTSP di Kantor. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).

1.1.5 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Donggala, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain: 1) APK RA/TKK; 2) APK MI/Ula; 3) APK MTs/Wustha /Madyama Widya Pasraman; 4) APK MA/Ula; 5) APM MI/Ula; 6) APM MTs/Wustha; 7) APM MA/Ula.

Tabel 4
Jenis Pendidikan, Unit Eselon I, Jenis Lembaga, Jumlah Lembaga, dan Jumlah Peserta Didik Kementerian Agama Kabupaten Donggala
Tahun 2019

No	Jenis	Unit Eselon I	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum Berciri Khas Agama	Ditjen Pendidikan Islam	1. RA 2. MI 3. MTs 4. MA	11 19 26 18	374 1.810 3.232 1.555
2	Pendidikan Keagamaan	Ditjen Pendidikan Islam Ditjen Bimas Kristen	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Wustha 2. Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Salafiyah Ula PTK Islam (PTKIN dan PTKIS) 1. SDTK 2. SMPTK 3. SMTK/SMAK		

	Ditjen Bimas Hindu	Madyama Widya pasraman		
--	--------------------	------------------------	--	--

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, 2020

Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam), jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 6 s.d. 13 tahun.

APK pada jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 12 s.d. 15 tahun. APK pada jenjang MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman di Sulawesi Tengah terhadap jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada usia 15 s.d. 21 tahun.

Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

1.1.6 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut:



Masih rendahnya nilai Ujian Nasional (UN) disebabkan oleh dua hal, yaitu: (i) tahun 2016 mulai diterapkannya penyelenggaraan UN berbasis komputer yg memiliki tingkat akuntabilitas penyelenggaraan lebih tinggi, (ii) meningkatnya tingkat kesukaran soal, dan (ii) diintegrasikannya soal-soal kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) dalam tes.

Untuk meningkatkan integritas peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antar atrilogi pusat pendidikan, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas, dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan. Pengembangan integritas peserta didik di madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya oleh kepala satuan pendidikan yang secara terus menerus dan berkesinambungan mengeluarkan kebijakan yang dapat menumbuhkembangkan perilaku integritas, misalnya: dengan menekan perilaku mencontek dengan membuat slogan: "kerja mandiri itu menyenangkan", "mencontek itu tidak asyik", dan "cari bocoran tidak asyik". Peningkatan integritas siswa dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru agama melalui keteladanan. Selain itu, guru membuat "buku siswa" yang ditandatangani oleh orang tua untuk tugas-tugas keagamaan. Peningkatan integritas peserta didik juga harus melibatkan keteladanan orang tua di rumah. Orang tua harus berkomunikasi dengan guru untuk memantau kegiatan peserta didik dalam kegiatan sehari-hari.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala pada masa-masa mendatang

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah lingkungan strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi (kekuatan) yang memengaruhi hasil capaian yang baik, peluang yang dihadapi, tantangan dan permasalahan (kelemahan) yang dimiliki. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, kelemahan untuk diperbaiki dan diperhitungkan dalam penyusunan program, tantangan untuk dimanfaatkan sebagai peluang, dan permasalahan untuk diatasi.

Berikut merupakan sejumlah potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi mendatang.

1.2.2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan antar Umat Beragama

Dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, ada beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dimiliki Kabupaten Donggala, dengan rincian sebagaimana Tabel 5 berikut:

No	Potensi/ Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/ Masalah
1.	Peran yang telah dilakukan oleh penyuluhan agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini	Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai <i>platform</i> digital untuk jauh (<i>on-line</i>) menjadi pembelajaran jarak tantangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyuluhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;	Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;	Rendahnya kompetensi penyuluhan agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan <i>platform</i> digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogik dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluhan agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal;
2.	Pembiasaan nilai kesalehan di lingkungan keluarga terbukti memberi pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini, seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antar sesama;	Penyuluhan agama diarahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antar manusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah;	Arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan Materi penyuluhan kesalehan sosial. belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;	Materi penyuluhan dengan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;
3.	Selain penyuluhan agama, penyebaran pesan-	Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV,	Belum adanya sistem pengendalian	Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi

	pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluhan agama;	instagram, internet, e-koran, memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keagamaan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T; dan	dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini; dan	rohaniwan dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan, yang selanjutnya berkaitan dengan pendekatan dalam pemahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama; dan
4.	Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.	Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi intra dan antar umat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportifitas.	Adanya kegiatan keagamaan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.	Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan ekskirimisme beragama.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat mempengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) Meningkatkan kompetensi penyuluhan agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*), (2) Revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) Standarisasi kompetensi bagi agen penyiaran pesan

keagamaan; (4) Optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) Pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.3 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis di Kabupaten Donggala, diuraikan dalam Tabel 6 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/ Masalah
1.	Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;	Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;	Belum semua amanat PBM dilaksanakan secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransista ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;	Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkungan aktor beragama atau pemerintahan;
2.	Karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat internmaupun ekstern antarumat beragama secara komprehensi, sinergis, berkesatup aduan, cepat, dan berkesinambungan	Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar	Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan raamah (anak, disabilitas, lansia);

			kehidupaan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;	
3.	Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, telah dibangun 11 KUA di Kabupaten Donggala. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah di samping tugas lainnya	Perkembangan digitalisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;	Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia	Ada 2 gedung KUA dalam kondisi rusak berat dan 5 KUA belum memiliki gedung sendiri sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas Sumber daya manusia pendukungnya terbatas.

1.1.1 Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, diuraikan dalam Tabel 7 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, sistem pendaftaran dan pelaporan haji terpadu sangat intensif;	Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan	Integrasi rekam kesehatan jemaah dengan sistem aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;	Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi

		dari masing-masing jamaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;		hasil yang diperoleh terbatas;
2.	Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masyarakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;	Perbedaan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifik dan cepat tanggap;	Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;	Pembekalan perugas haji masih dilakukan secara konvensional;
3.	Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;	Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;	Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum diprogramkan untuk mempertahankan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;	Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
4.	Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam persiapan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah.	Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu.	Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaraan ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi.	Masih adanya biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga ada masyarakat Yang menjadi korban

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada:

1. efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
2. penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; dan

3. penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah.

1.2.4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, diuraikan dalam Tabel 8 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja wilayah maupun kota/kabupaten sudah berjalan cukup baik;	Ada 16 Kecamatan Perlu pengawasan intensif;	Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan;	Proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif;
2.	Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;	Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;	Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;	Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;
3.	Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenag Kabupaten Donggala	Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja.	Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja.	Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid, reliable, up-to-date*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja.

1.2.5 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan akses layanan pendidikan di Donggala,

diuraikan dalam Tabel 9 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Penerapan kurikulum2013 merintis pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku;	Kurikulum 2013 berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;
2.	Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama;	Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi;
3.	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;	Muatan pendidikan agama masih fokus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;	Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;

4.	Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin.	Pemerintah menjamin akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP.	Kenaikan APK belum diikuti dengan peningkatan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan mutunya.	Akses pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi dalam pengukuran IPM.
----	--	--	---	---

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan akses layanan pendidikan umum terutama yang berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afirmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifikasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

1.2.6 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Terdapat beberapa potensi, tantangan, kelemahan dan ancaman/masalah yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan di Donggala yang diuraikan dalam Tabel 10 berikut:

No.	Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1.	Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama dapat: mengekspresikan identitas budaya; menempuh pendidikan; mendalami ajaran agama; meretas jalan	Diversifikasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;	Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasaranaanya belum memadai;	Kualitas guru dan sarana prasarana yang belum optimal dan sebagian masih didukung oleh guru Non PNS dan persebaran guru PNS yang belum merata;

	kultural yang mendorong proses mobilitas sosial; dan menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;			
2.	Pemerintah telah memberikan BOS, yang menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkannya bantuan afirmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah.	Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afirmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran.	Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuhkan di lapangan karena belum sinkronnya data DTKS dengan data pendidikan di Kementerian Agama.	Proporsi dana BOS yang disediakan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada:

1. peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran;
2. peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik;
3. peningkatan kualitas mental/karaktersiswa; dan
- 4) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala merupakan salah satu instansi pemerintah yang bersifat vertikal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Donggala berdasarkan Kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

2.1 Visi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu ***“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”***. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
4. Moderat, artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
6. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) dari pada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil

Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5);
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5);
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8)
7. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3);
8. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1)

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

2.3 Tujuan Kementerian Agama

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas.

2.4. Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala

1. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
2. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai kinerja penyuluhan agama;
- Persentase penyuluhan agama yang dibina;
- Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
- Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan;

Tujuan 2 : Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;

- e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata Religi, Situs, Artefak);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh: Pesparawi, MTQ, STQ, Utsawa, dan lain-lain);

4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

Tujuan 3 : Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - e. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;
 - f. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan keluarga sakinah/kristiani/sukinah.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu.
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase keberlanjutan layanan (*continuity service*).

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Tujuan 4: Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase ustaz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

4. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
5. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase ustaz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
6. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase RA/ yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;
 - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah;
 - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan;
 - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

3. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
4. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

Tujuan 6: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 3 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);

- e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
3. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan;
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
4. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai *Opname Physic* BMN.
5. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
6. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
8. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
 10. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
 11. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni: persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
 12. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicount.
 13. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan *reliable*.
 14. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah pegawai, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

2.5 Nilai-nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketakwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketakwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang merekayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horizontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah- langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan. Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;

- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama; melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- e. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- f. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat. Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan ; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala memiliki strategi melalui 6 (enam) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
3. Program Pendidikan Islam;
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Program Bimbingan Masyarakat Hindu;

Untuk tahun 2021, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
4. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
6. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
7. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
8. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu;
10. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu;
11. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
12. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
13. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;

14. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
15. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
16. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
17. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
18. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
19. Pembinaan Haji;
20. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
21. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
22. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
24. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
25. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen;
26. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu;
27. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
28. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam;
29. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
30. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada Bab II.

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah serta masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tahun 2020 s.d. 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Di samping itu terdapat kegiatan yang sasarannya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sedangkan anggarannya berada pada Unit Eselon I Pusat antara lain anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, Bantuan Sarpras Madrasah Swasta, Pengadaan Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Pengadaan Buku Nikah.

Adapun rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama sampai dengan 2024 melalui sumber pembiayaan APBN pada tabel berikut:

Tabel 11
Rencana Pendanaan 7 (tujuh) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	9.345.000	000000	14.033.000	15.437.000	16.980.440
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	240.000	264.000	290.400	319.440
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	673.000	740.000	814.000	895.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.930.000	7.6323.000	8.385.000	9.224.000	10.146.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	586.000	645.000	709.000	780.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	457.000	503.000	553.000	609.000
Pembinaan Administrasi Umum	2.415.000	2.657.000	2.922.000	3.215.000	3.536.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	522.000	574.000	632.000	695.000
Program Kerukunan Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000
Program Bimbingan Masyarakat Islam	11.816.344.	10.177.703	12.215.327	13.064.327	15.030.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	4.302.321	2.339.327	4.139.327	4.539.327	5.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	766.750	1.106.000	1.306.000	1.500.000	2.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.000	14.8000	20.000	25.000	30.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	0	0	0	0	0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	6.746.273	6.717.576	6.750.000	7.000.000	8.000.000
Program Pendidikan Islam	32.850.804	24.317.628	26.500.875	28.420.445	30.633.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7.675.301	23.000	25.000	30.000	35.000
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam		3.772.373	3.800.550	3.865.000	3.920.000
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	5.584.600				
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	8.631.681				
Dukungan Manajemen	10.959.222	20.522.255	22.675.325	24.525.220	26.678.000

Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam					
---	--	--	--	--	--

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.510.143.	1.580.150	1.610.125	1.650.125	1.780.250
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	-	15.000	20.000	25.0000	30.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	48.000	96.000	120.000	144.000	180.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	26.000	77.850	85.150	95.000	115.250
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.435.543	1.545.350	1.565.550	1.650.250	1.750.250
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	-	25.000	35.000	45.000	50.000
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	1.258.340.	1.376.317	1.445.133.	1.517.390.	1.593.259
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	667.532.000	119.250.00	125.212.500	131.473.125	138.046.781
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	-	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	590.808.000	526.838.000	553.180.000	580.839.000	609.881.000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	-	700.229.000	735.240.450	772.002.472	810.602.596
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	869.524	4.401.000	990.000	1.050.000	1.110.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	7.500	15.000	20.000	25.000	30.000
Pembinaan Haji	40.084	65.000	70.000	75.000	80.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	821.940	4.321.000	900.000	950.000	1.000.000

Tabel 12
Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	240.000	264.000	290.400	319.440
Pembinaan Administrasi Kepegawain	-	673.000	740.000	814.000	895.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	6.930.000	7.623.000	8.385.000	9.224.000	10.146.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	586.000	645.000	709.000	780.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	457.000	503.000	553.000	609.000
Pembinaan Administrasi Umum	2.415.000	2.657.000	2.922.000	3.215.000	3.536.000
Pembinaan Administrasi Informasi	-	522.000	574.000	632.000	695.000

Keagamaan dan Kehumasan					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3.250.000	3.575.000	3.933.000	4.326.000	4.759.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	20.337.000	22.370.000	24.607.000	27.068.000	29.775.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.544.000	3.899.000	4.288.000	4.717.000	5.189.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	26.000	77.850	85.150	95.000	115.250
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.435.543	1.545.350	1.565.550	1.650.250	1.750.250
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu		997.000	1.097.000	1.206.000	1.327.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	120.000	132.000	145.000	160.000	176.000
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	5.316.000	6.716.000	7.385.000	8.118.000	8.931.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	116.000	995.000	1.095.000	1.204.000	1.325.000

Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	937.000	1.031.000	1.134.000	1.247.000	1.372.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	170.000	187.000	206.000	226.000	249.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	235.000	258.000	284.000	312.000	344.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	271.000	298.000	328.000	360.000	397.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	7.500	15.000	20.000	25.000	30.000
Pembinaan Haji	40.084	65.000	70.000	75.000	80.000
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	28.000	33.000	34.000	35.000	35.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	48.000	96.000	120.000	144.000	180.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.480.000	1.628.000	1.790.000	1.969.000	2.166.000
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	269.000	398.000	484.000	570.000	660.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	115.000	126.000	139.000	153.000	168.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam					
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	-	15.000	20.000	25.0000	30.000

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	115.000	126.000	139.000	153.000	168.000
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	62.000	69.000	76.000	83.000	92.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	30.000	40.000	55.000	70.000	75.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu					
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha					
Program PAUD & Wajib Belajar 12 Tahun	3.545.000??	3.900.000	4.289.000	4.719.000	5.192.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	847.000	931.000	1.024.000	1.127.000	1.240.000
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.542.000??	1.697.000	1.866.000	2.053.000	2.259.000

PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tahun 2020- 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Di samping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Donggala.

H. RUSDIN, S.Ag, MM

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 5 PROGRAM

LAMPIRAN II
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 12 PROGRAM

LAMPIRAN III
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024
(KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1059 TAHUN 2020 TANGGAL 22 APRIL 2020)

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024
(KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1059 TAHUN 2020 TANGGAL 22 APRIL 2020)**

1. Penanggungjawab : Rusdin (Kepala Kantor).
2. Ketua : Sarina Unok (Kepala Sub Bag Tata Usaha).
3. Sekretaris : Mulkin (Analisis Kepegawaian).
4. Anggota :
 - 1) Abidin (Kepala Seksi Pendidikan Islam);
 - 2) Burhan Munawir (Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah);
 - 3) Darwin Panessai (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam);
 - 4) Jotje Djemi Lombogia (Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen);
 - 5) Usman (Penyelenggara Zakat & Wakaf);
 - 6) I Nyoman Dana (Penyelenggara Hindu);
 - 7) Moh. Yanas (Pelaksana pada Urusan Keuangan);
 - 8) Jafar Shadiq (Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam);
 - 9) Ardiansyah (Pelaksana pada Seksi Penyelenggara Haji & Umrah);
 - 10) Marzuki (Pelaksana pada Seksi Penyelenggara Haji & Umrah);
 - 11) St. Syarfah Latuconsina (Pelaksana pada Urusan Kepegawaian)
 - 12) Ostin Todaga (Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen)

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama				116	995	1.095	1.204	1.325						Subbag Ortala dan KUB
SK.13.5620.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1													
IKSK.13.56 20.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	95	95	95	95	95							
IKSK.13.56 20.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	840	850	900	910	920	930						
IKSK.13.56 20.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	1	2	3	4	5	6						
SK.13.5620.	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	2													
IKSK.13.56 20.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	14	14	14	14	14	14						

IKSK.13.56 20.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	0	14	14	14	14	14						
SK.13.5620 3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)														
IKSK.13.56 20.3.1	Percentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
SK.13.5620 4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya														
KSK.13.562 0.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya		Kegiatan	10	15	20	30	40	50						
2098-Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN										-	240	264	29 0	319	Subbag Kepegawaian dan Hukum
SK.1.2098.1	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum														
IKSK.1.209 8.1.1	Percentase produk hukum yang diharmonisasikan		%	10	50	60	75	80	85						
IKSK.1.209 8.1.2	Percentase produk hukum yang diterbitkan		%	10	30	40	50	75	85						
IKSK.1.209 8.1.3	Percentase kasus hukum yang terselesaikan		%	10	40	50	75	85	95						
IKSK.1.209 8.1.4	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kegiatan	0	0	1	2	3	4						

2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian											-	673	740	81 4	895	Subbag Kepegawaian dan Hukum
PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)															
IKSK.1.209 9.1.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan Satker		%	90	90	100	100	100	100							
IKSK.1.209 9.1.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	90	100	100	100	100	100							
IKSK.1.209 9.1.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan		%	50	50	60	75	80	95							

	jabatan														
IKSK.1.209 9.1.4	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50	60	75	80	85	90						
KSK.1.209 .1.5	Percentase ASN .1.5 yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	30	40	50	60	70	85						
IKSK.1.209 9.1.6	Percentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90	95	95	95	95	95						
IKSK.1.209 9.1.7	Percentase data ASN yang diupdate		%	90	100	100	100	10 0	100						
IKSK.1.209 9.1.8	Percentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	60	70	75	80	80	90						

2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN										6.93	7.623	8.385	9.224	10.146	Subbag Keuangan c
SK.1.2100.1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan														
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	8	8	8	8	8	8						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	50	70	80	85	100	100						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	97.84	98	98	98.2	98.25	98.3						
IKSK.1.2100.1.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	75	80	80	85	85	90						

PROG RAM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGU
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2100 .1.5	Persentase pencapaian dan penetapan target PNBP dan BLU		%	100	100	100	100	100	100						
SK.1.2100.2	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel														
IKSK.1.2100 .2.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	10	50	50	50	55	55						
IKSK.1.2100 .2.2	Persentase tanah yang bersertifikat		%	80	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2100 .2.3	Persentase nilai <i>Opname Physic (OP)</i> BMN		%	100	100	100	100	100	100						
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana										-	586	645	709	780	Subbag Ortala
SK.1.2101.1	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi														
IKSK.1.2101 .1.1	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi		%	50	60	65	70	75	80						
IKSK.1.2101 .1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	5	7	9	11	13						

IKSK.1.2101 .1.3	Percentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	50	60	65	70	80					
IKSK.1.2101 .1.4	Percentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	25	30	35	40	45					
IKSK.1.2101 .1.5	Percentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	10	15	20	30	50	75					
IKSK.1.2101 .1.7	Percentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	35	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5					
SK.1.2101.2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.1.2101 .2.1	Percentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi		%	25	25	25	30	30	35					
IKSK.1.2101 .2.2	Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	14	15	16	17	18	19					

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGU H
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2101.2.3	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14	28	42	56	70	84						
IKSK.1.2101.2.4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	3	10	15	20	25	50						
2102-Pembinaan Administrasi Perencanaan										416	457	503	553	609	Subbag Perencanaan dan Info
SK.1.2102.1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran														
IKSK.1.2102.1.1	Percentase <i>output</i> perencanaan yang berbasis data		%	90	90	93	95	95	100						
IKSK.1.2102.1.2	Percentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90	90	90	95	100	100						
SK.1.2102.2	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran														
IKSK.1.2102.2.1	Percentase laporan capaian kinerja perencanaan dan		%	92.26	93	94	95	96	96						

	anggaran yang berkualitas															
IKSK.1.2102.2.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional		%	70	70	70	75	75	80							
2103-Pembinaan Administrasi Umum																
SK.1.2103.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor															
IKSK.1.2103.1.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar		%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00							
SK.1.2103.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa															
IKSK.1.2103.2.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu		%	97	98.06	99.03	100	100	100							
IKSK.1.2103.2.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	55	56.41	85.79	100	100	100							
IKSK.1.2103.2.3	Persentase surat yang diarsipkan		%	72	74.21	83.26	100	100	100							
IKSK.1.2103.2.4	Persentase menurunnya lelang gagal		%	65	68.05	74.95	85.27	89.6	98.85							
IKSK.1.2103.2.5	Persentase menurunnya sanggah dan		%	50	52.25	71.65	82.77	86.9	96.85							

sanggah banding

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

IKSK.1.2125.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	50,00	50,00	64,00	76,00	82,00	89,00							
SK.1.2125.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.1.2125.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00							
IKSK.1.2125.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00							
SK.1.2125.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.1.2125.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	70	70	80	80	90	100							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2125.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	70	70	80	90	100	100						
IKSK.1.2125.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	55	55	60	70	80	90						
SK.1.2125.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.1.2125.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
IKSK.1.2125.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	70,00	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00						
SK.1.2125.5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.1.2125.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80,00	81,00	85,00	87,00	90,00	90,00						
IKSK.1.2125.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	80	80	90	100	100	100						
IKSK.2.2104.1.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	15	30	40	50	50	60						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendataan Program													
Kode Kinerja	Kinerja	Kegiatan											
IKSK.2.2104.1.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	0	0	250	300	300	300				
IKSK.2.2104.1.5	Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina		Orang	0	0	0	0	0	0				
IKSK.2.2104.1.6	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan		Dokumen	5700	5600	5700	6000	6000	6000				
SK.2.2104.2	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga					937	1.031	1.134	1.247	1.372			
IKSK.2.2104.2.1	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinhah		Pasangan	0	0	30	50	60	65				
2122-Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf										1	187	206	226
SK.2.2122.1	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat									7		249	Bidang Bimas Is
										0			

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARGE T					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	202 4	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2122.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	2	2	2	2	3	5						
IKSK.2.2122.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	1,1	1,1	1,8	2,4	2,8	4,6						
IKSK.2.2122.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	4,02	4,02	50,3	50,6	60	73,03						
SK.2.2122.2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf														
IKSK.2.2122.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	2,01	2,01	40,05	60,05	70	80						
IKSK.2.2122.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	10	10	15	15	15	20						
IKSK.2.2122.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	3,32	3,32	5,41	8,55	15	17,89						
SK.2.2122.3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat														
IKSK.2.2122.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	2	2	6	12	14	15						
IKSK.2.2122.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	20	20	40	50	50	60						
2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam										235	258	284	312	344	Bidang Bimas Is
SK.2.2123.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama														
IKSK.2.2123.1.1	Nilai kinerja penyuluhan agama		Nilai	90	90	90	90	90	100						
IKSK.2.2123.1.2	Persentase penyuluhan agama yang dibina		%	20	20	20	30	40	47						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

IKSK.2.2123.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	14	14	14	14	14	14						
IKSK.2.2123.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan		Kelompok	500	500	600	733	765	885						
SK.2.2123.2 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama															
IKSK.2.2123.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	2	2	6	12	14	15						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

IKSK.2.2123.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)		Kegiatan	1	1	1	1	1	1								
SK.2.2123.8	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan																
IKSK.2.2123.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00								
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah										271	298	328	360	397		Bidang Isl	
SK.2.2124.1	Meningkatnya penanganan konflik intra umat beragama																
IKSK.2.2124.1.1	Persentase konflik intra umat beragama yang ditindaklanjuti		%	0	0	0	0	0	0								
SK.2.2124.2	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran																
IKSK.2.2124.2.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2								

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOK	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.2.2124.2.2	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina		Orang	30	30	40	40	40	40						
IKSK.2.2124.2.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	30	30	40	40	50	50						
IKSK.2.2124.2.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan		Lokasi	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2124.3	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama														
IKSK.2.2124.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi		Dokumen	1	1	1	1	1	1						
IKSK.2.2124.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	1	1	1	1	1	1						
SK.2.2124.4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.2.2124.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	200	200	250	250	300	300						
IKSK.2.2124.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar	50	50	75	75	100	100						
IKSK.2.21204.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	16	16	17	17	17	17						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

IKSK.2.2124.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	10	10	10	15	15	15					
IKSK.2.2124.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina		Orang	1	2	3	4	5	5					
IKSK.2.2124.4.6	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	0	0	1	1	1	1					
IKSK.2.2124.4.7	Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya		Lembaga	1	1	1	1	1	1					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	2022	2023	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024	
IKSK.1.2135.2.1	Percentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	10,00	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0						
IKSK.1.2135.2.2	Percentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.1.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.1.2135.3.1	Percentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.1.2135.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.1.2135.3.3	Percentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	-	-	-	-	-	-						
SK.1.2135.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern														
IKSK.1.2135.4.1	Percentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.1.2135.4.2	Percentase data pendidikan yang komprehensif, valid		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024	
IKSK.3.4422. 2.1	Percentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	63	70	71	72	73	80						
IKSK.3.4422. 2.2	Percentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	52	62	68	70	71	75						
IKSK.3.4422. 2.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan		Lemba ga	NA	2	5	5	5	7						
IKSK.3.4422. 2.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		Lemba ga	NA	7	7	7	7	10						
SK.3.4422.3 Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan															
IKSK.3.4422. 3.1	Percentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	50,0 0	52,0 0	58,0 0	60,0 0	70,0 0						
SK.3.4422.4 Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran															
IKSK.3.4422. 4.1	Percentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	3	4	5	10	15	20						
IKSK.3.4422. 4.2	Percentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	3	4	5	10	15	20						
SK.3.4422.5 Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi															
IKSK.3.4422. 5.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status		Lemba ga	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

	akreditasi														
SK.3.4422.6	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.4422.6.1	Percentase madrasah yang menerapkan budaya mutu		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.4422.6.2	Percentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.7	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan														
IKSK.3.4422.7.1	Percentase madrasah yang mendapatkan pelatihan sistem e-RKAM		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.8	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.3.4422.8.1	Percentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4422.8.2	Percentase madrasah yang ramah anak		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
SK.3.4422.9	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan														
IKSK.3.4422. 9.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4422. 9.2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4422.10	Menguatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi														
IKSK.3.4422. 10.1	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan <i>life skill</i> melalui program magang		%	-	-	-	-	-	-						
2133-Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah										62	69	76	83	92	Bidang Pendidik an Madrasah
SK.3.2133.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.3.2133. 1.1	Persentase guru madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	4	13	13	13	13	13						
IKSK.3.2133. 1.2	Persentase pengawas madrasah yang dibina dalam moderasi beragama		%	5	8	17	18	19	25						
SK.3.2133.2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.2133.	Persentase guru pada madrasah yang lulus		%	70	NA	72	75	76	76						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

	2.1 sertifikasi													
IKSK.3.2133.2.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	7	12	15	17	17.5	24					
IKSK.3.2133.2.3	Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.18	0.4	8	9	9	9					
IKSK.3.2133.2.4	Persentase guru madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	0.02	0.04	12	12	12	12					
SK.3.2133.3	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan													
IKSK.3.2133.3.1	Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	46.5	45.5	46.5	48	49	49.5					
IKSK.3.2133.3.2	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah		Orang	300	90	90	90	90	90					
SK.3.2133.4	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik													
IKSK.3.2133.4.1	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG		%	1	1.5	2	2.5	4	5					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASEL I NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024	
IKSK.3.2133.4.2	Percentase calon pengawas yang menerima beasiswa S2		%	1.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4						
SK.3.2133.5 Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.3.2133.5.1	Percentase guru pada madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.3.2133.5.2	Percentase tenaga kependidikan madrasah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	NA	NA	50,00	85,00	100,00	100,00						
SK.3.2133.6 Meningkatnya kualitas pendidik vokasi															
IKSK.3.2133.6.1	Jumlah guru MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	20	25	80	90	100	150						
4433-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam															
SK.3.4433.1	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama														Bidang PAKIS
IKSK.3.4433.1.1	Percentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	0.25	0.4	0.42	0.43	0.45						
IKSK.3.4433.	Percentase peningkatan peserta		%	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

	1.2 pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an													
	SK.3.4433.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir												
IKSK.3.4433.	2.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	80,0 0	83,0 0	85,0 0	87,0 0	89,0 0	91,0 0					
IKSK.3.4433.	3.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	NA	10,0 0	13,0 0	16,0 0	20,0 0	25,0 0					
	SK.3.4433.4	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan												
IKSK.3.4433.	4.1	Persentase ustadz pada pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi	%	-	-	-	-	-	-					
IKSK.3.4433.	4.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	-	-	-	-	-	-					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	2022	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024	
IKSK.3.4433. 4.3	Percentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433. 4.4	Percentase ustaz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.5	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.3.4433. 5.1	Percentase ustaz pendidikan diniyah/ muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.6	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.3.4433. 6.1	Percentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.7	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi melalui peningkatan kualifikasi pendidik														
IKSK.3.4433. 7.1	Percentase ustaz pendidikan diniyah/ muadalah yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	2022	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
IKSK.3.4433. 10.2	Percentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.3.4433. 11.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.4433. 11.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.3.4433.12	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.3.4433. 12.1	Jumlah guru/instruktur pada Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren yang mengikuti peningkatan kompetensi		Orang	NA	2	4	6	7	9						
2127-Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam										115	126	139	153	168	Bidang PAKIS
SK.3.2127.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran/mata kuliah agama														
IKSK.3.2127. 1.1	Percentase siswa muslim di sekolah yang		%	40,00	45,0 0	55,0 0	65,0 0	75,0 0	85,0 0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	2024	
IKSK.3.2127.3.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00						
SK.3.2127.4 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik															
IKSK.3.2127.4.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.3.2127.4.2	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1		%	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
SK.3.2127.5 Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan															
IKSK.3.2127.5.1	Persentase guru pendidikan agama Islam pada Sekolah daerah khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
SK.3.2127.6 Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan															
IKSK.3.2127.6.1	Persentase guru pendidikan agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	NA	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Indikator Kinerja dan Penilaian Program														
IKSK.3.2127.6.2	Percentase pengawas pendidikan agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	%	NA	10,0	20,0	30,0	35,0	40,0						
				0	0	0	0	0						
2129-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah														
									20.2	22.2	24.4	26.8	29.58	Bidang Pendidikan Madrasah
SK.4.2129.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan													
IKSK.4.2129.1.1	Percentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	70	71	73	75	78	80						
IKSK.4.2129.1.2	Percentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	77	79	80	81	82						
IKSK.4.2129.1.3	Percentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	78	79	80	83	85	87						
IKSK.4.2129.1.4	Percentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	79	80	83	85	88	89						
IKSK.4.2129.1.5	Percentase madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	60	61	62	65	66	69						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB	
					202 0	2021	2022	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4		
SK.4.2129.2 Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat																
IKS.K.4.2129.2.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	240 79	240 79	2528 3	2654 7	278 74	2926 8							
IKS.K.4.2129.2.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	382 69	382 69	4018 2	4219 2	443 01	4651 6							
IKS.K.4.2129.2.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	197 72	197 72	2076 1	2179 9	228 89	2403 3							
IKS.K.4.2129.2.4	Persentase siswa MI penerima PIP		%	9	10	10	10	11	11.5							
IKS.K.4.2129.2.5	Persentase siswa MTs penerima PIP		%	10	11	12	12	12	13							
IKS.K.4.2129.2.6	Persentase siswa MA penerima PIP		%	11	12.5	12.5	12.5	12.5	13.5							
IKS.K.4.2129.2.7	Jumlah madrasah yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	-	-	-	-	-	-							
SK.4.2129.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah																
IKS.K.4.2129.3.1	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang	435 5	435 5	4573	4801	504 1	529 4							
SK.4.2129.4 Meningkatnya kualitas penanganan ATS																
IKS.K.4.2129.4.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi		%	0.01	0.05	0.1	0.15	0.17	0.2							
2128-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam										1.80 3	1.98 3	2.18 1	2.39 9	2.63 9	Bidang PAKIS	
SK.4.2128.1 Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama																
IKS.K.4.2128.1.1	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah		%	2	3	3.5	4	4.5	5							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024	
IKSK.2.2137.2.1	Percentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35	35	35	35	35	35						
IKSK.2.2137.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	39	0	39	39	39	39						
SK.2.2137.3 Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama															
IKSK.2.2137.3.1	Percentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat		%	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00						
SK.2.2137.4 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran Kelembagaan & Sistem Infomasi															
IKSK.2.2137.4.1	Percentase rumah ibadah yang ramah		%	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00						
IKSK.2.2137.4.2	Percentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00						
SK.2.2137.9 Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi Penyuluhan & Budaya Keagamaan															
IKSK.2.2137.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	3	3	3	3	3	3						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

SK.2.2137.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan Kelembagaan &	SISTEM Sistem Infomasi									
		IKSK.2.2137.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	0	0	0	50	50	50	
IKSK.2.2137.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	0	200	0	200	200	200			
IKSK.2.2137.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	12,0 0	12,0 0	12,0 0	12,0 0	12,0 0	12,0 0			
SK.2.2137.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan Kristen Kelembagaan &	SISTEM Sistem Infomasi									
IKSK.2.2137.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Kristen yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan	Lembaga	5	5	5	5	5	5			

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
	4434-Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen									62	163	214	264	325	Seksi PAK PAUD & Pendidikan Dasar, PAK Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Keagamaan Kristen
SK.3.4434.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.3.4434. 1.1	Percentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/S MAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.3.4434. 1.2	Percentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20						
IKSK.3.4434. 1.3	Percentase pengawas SDTK/SMPTK/SMTK/SM AK yang dibina dalam moderasi beragama		%	30	30	30	30	30	30						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

I KSK.3.4434.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10	10	10	10	10	10					
I KSK.3.4434.1.5	Percentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70	71	72	73	74	75					
I KSK.3.4434.1.6	Percentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21	21	21	21	21	21					
I KSK.3.4434.1.7	Percentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10					
SK.3.4434.2	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir													
I KSK.3.4434.2.1	Percentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0					
SK.3.4434.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif													
I KSK.3.4434.3.1	Percentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB	
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	2023	2024		
SK.3.4434.6		Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.3.4434. 6.1	Percentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0							
IKSK.3.4434. 6.2	Percentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0	70,0 0							
SK.3.4434.7		Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.3.4434. 7.1	Percentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengikuti PPG		%	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0							
IKSK.3.4434. 7.2	Percentase guru pendidikan agama Kristen yang mengikuti PPG		%	40,0 0	40,0 0	40,0 0	40,0 0	40,0 0	40,0 0							
SK.3.4434.9		Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.3.4434. 9.1	Percentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0	10,0 0							
SK.3.4434.10		Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.3.4434. 10.1	Percentase SDTK/ SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter		%	35,0 0	35,0 0	35,0 0	35,0 0	35,0 0	35,0 0							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

	dalam pembelajaran														
IKSK.3.4434.10.2	Persentase SMPTK/SMTK/SMAK yang Ramah Anak	%	45,0 0	45,0 0	45,0 0	45,0 0	45,0 0	45,0 0							
SK.3.4434.11	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan														
IKSK.3.4434.11.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Kegiatan	7	7	7	7	7	7							
IKSK.3.4434.11.2	Jumlah gugus pramuka pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang dibina	Unit	7	7	7	7	7	7							
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen											931				Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen
SK.4.2136.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKSK.4.2136.1.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	5	5	5				5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
IKSK.4.2136. 1.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5	5	5			5						
IKSK.4.2136. 1.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	5	5	5			5						
IKSK.4.2136. 1.4	Persentase SDTK/SMPTK/ SMTK/SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	5	5	5			5						
SK.4.2136.2	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat														
IKSK.4.2136. 2.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS		Orang	81	81	79			90						
IKSK.4.2136. 2.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS		Orang	35	35	45			45						
IKSK.4.2136. 2.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS		Orang	151	151	174			174						
IKSK.4.2136. 2.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP		%	39	39	71			90						
IKSK.4.2136. 2.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP		%	35	35	45			45						
IKSK.4.2136. 2.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK penerima PIP		%	151	151	174			174						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	2022	2023	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 5 Program

IKS.K.4.2142.2.3	Widya Pasraman penerima BOS		Orang			20	45	65	85					
IKS.K.4.2142.2.4	Persentase siswa Adhi Widya Pasraman penerima PIP		%	45	55	65	70	75	80					
IKS.K.4.2142.2.5	Persentase siswa Madyama Widya Pasraman penerima PIP		%	53	65	78	80	85	90					
IKS.K.4.2142.2.6	Persentase siswa Utama Widya Pasraman penerima PIP		%	0	55	68	70	85	90					
IKS.K.4.2142.2.7	Jumlah Adhi/Madyama/ Utama Widya Pasraman yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	2	2	2	2	3	3					
SK.4.2129.3 Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKS.K.4.2129.3.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatkan mutunya melalui BOP			2	3	3	3	3	3					

2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah	3.25	3.57	3.93	4.326	4.75	Bidang PHU
---	------	------	------	-------	------	------------

SK.1.2150.1 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	83,00						
SK.1.2150.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.1.2150.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00						
IKSK.1.2150.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	75,00	75,00	76,00	80,00	85,00	93,00						
SK.1.2150.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.1.2150.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	65	65	65	69	70	72						
IKSK.1.2150.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja		%	89	89	90	91	92	94						
IKSK.1.2150.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang		%	75,00	75	80	84	86	90						

	ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya															
SK.1.2150.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern															
IKS.K.1.2150.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	67,0 0	67,0 0	69,0 0	70,0 0	75,00	80,0 0							
IKS.K.1.2150.4.2	Persentase data agama yang komprehensif, valid dan reliabel		%	78,0 0	78,0 0	80,0 0	88,0 0	90,00	90,0 0							
SK.1.2150.5	Meningkatnya ASN yang profesional															
IKS.K.1.2150.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	68,0 0	68,0 0	70,0 0	72,0 0	73,0 0	77,0 0							
IKS.K.1.2150.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70,0 0	70	75	76	79	81							
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										128	140	154	170	187	Bidang PHU	
SK.2.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji															
IKS.K.2.2147.1.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan		%	65	69	85	90	95	98							
IKS.K.2.2147.1.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	0,5	0,8	10	13	15	18							

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATUA N	BASELI NE 2019	TARG ET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					202 0	202 1	2022	202 3	2024	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	
SK.2.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji														
IKS.K.2.2147.2.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	13	13	16	20	25	30						
IKS.K.2.2147.2.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80	80	85	86	87	87.5						
2148-Pembinaan Haji										755	831	914	1.005	1.106	Bidang PHU
SK.2.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji														
IKS.K.2.2148.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	87	87	87	87	87	88						
IKS.K.2.2148.1.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	93,00	93	94	94.5	95	96						
IKS.K.2.2148.1.3	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	65	65	65	70	80	90						
IKS.K.2.2148.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	30	30	30	30	30	30						
IKS.K.2.2148.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	80	80	81	82	84	88						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										128	140	154	170	187	Bidang PHU
SK.2.2149.1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji														
IKS.K.2.2149.1.1	Persentase petugas haji yang profesional		%	75	78	85	87	90	92						

IKSK.2.2149. 2.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	98	98	98	98	98	98					
IKSK.2.2149. 2.2	Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	75	80	85	90	90	95					

LAMPIRAN II
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 12 PROGRAM

Lampiran II
Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2099-Pembinaan Administrasi Kepegawaian									-	673	740	814	895	Subbag Kepegawaian dan Hukum
SK.1.2099.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)														
IKSK.1.2099.1.1	Percentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja		%	90	90	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.2	Percentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti		%	90	100	100	100	100	100						
IKSK.1.2099.1.3	Percentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen		%	50	50	60	75	80	95						

Lampiran II

	kompetensi dengan jabatan													
IKSK.1.209 9.1.4	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	50	60	75	80	85	90					
IKSK.1.209 9.1.5	Percentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	30	40	50	60	70	85					
IKSK.1.209 9.1.6	Percentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	90	95	95	95	95	95					
IKSK.1.209 9.1.7	Percentase data ASN yang diupdate		%	90	100	100	100	100	100					
IKSK.1.209 9.1.8	Percentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	60	70	75	80	80	90					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2100-Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN									6.93	7.623	8.385	9.224	10.146	Subbag Keuangan dan BMN
SK.1.2100	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1													
IKSK.1.2100.1.1	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		Dokumen	8	8	8	8	8	8						
IKSK.1.2100.1.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	50	70	80	85	100	100						
IKSK.1.2100.1.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	97.84	98	98	98.2	98.25	98.3						
IKSK.1.2100	Persentase		%	75	80	80	85	85	90						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

0.1.4	penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama														
IKSK.1.210	Persentase pencapaian dan penetapan target PNBP dan BLU	0.1.5	%	100	100	100	100	100	100	100					
SK.1.2100	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	2													
IKSK.1.210	Persentase nilai barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	0.2.1	%	10	50	50	50	55	55						
IKSK.1.210	Persentase tanah yang bersertifikat	0.2.2	%	80	100	100	100	100	100						
IKSK.1.210	Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	0.2.3	%	100	100	100	100	100	100						
2101-Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana										-	586	645	709	780	Subbag Ortala dan KUB
SK.1.2101	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1													
IKSK.1.210	Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi	1.1.1	%	50	60	65	70	75	80						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.1.210 1.1.2	Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan		Dokumen	NA	5	7	9	11	13					
IKSK.1.210 1.1.3	Percentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru		%	NA	50	60	65	70	80					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.210 1.1.4	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis		%	NA	25	30	35	40	45						
IKSK.1.210 1.1.5	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	10	15	20	30	50	75						
IKSK.1.210 1.1.7	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	35	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5						
SK.1.2101 2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi														
IKSK.1.210 1.2.1	Persentase satuan kerja yang telah		%	25	25	25	30	30	35						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi												
IKSK.1.210	Jumlah satuan kerja 1.2.2 yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Satker	14	15	16	17	18	19				
IKSK.1.210	Jumlah satuan kerja 1.2.3 yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14	28	42	56	70	84				
IKSK.1.210	Jumlah agen 1.2.4 perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	3	10	15	20	25	50				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.1.210	Jumlah sistem 6.2.2 informasi yang terintegrasi dalam MoS (Mora one Search)		Unit	0	0	1	5	10	14						

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5620-Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama									116	995	1.095	1.204	1.325	Subbag Ortala dan KUB
SK.13.562	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama 0.1														
IKSK.13.56 20.1.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti		%	95	95	95	95	95							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.13.56 20.1.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina		Orang	840	850	900	910	920	930								
IKSK.13.56 20.1.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina		Lokasi	1	2	3	4	5	6								
SK.13.562 0.2	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa																
IKSK.13.56 20.2.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi		Lembaga	14	14	14	14	14	14								
IKSK.13.56 20.2.2	Jumlah forum dialog antarumat beragama yang diselenggarakan		Kegiatan	0	14	14	14	14	14								
SK.13.562 0.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)																
IKSK.13.56 20.3.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP		%	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00								
SK.13.562 0.4	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya																
IKSK.13.56 20.4.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya		Kegiatan	10	15	20	30	40	50								
2104-Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah										937	1.031	1.134	1.247	1.372	Bidang Bimas		

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

										Islam
SK.8.2104. Meningkatnya kualitas pelayanan 1 nikah/rujuk										
IKS.K.8.210	Jumlah KUA yang 4.1.1 direvitalisasi		Lokasi	1	2	1	2	2	2	
IKS.K.8.210	Jumlah KUA yang 4.1.2 ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	2	2	2	2	3	3	
IKS.K.8.210	Jumlah calon 4.1.3 pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	30	50	30	30	60	60	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.8.212 2.1.1	Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah		%	1	1	1	1	1	1					
IKSK.8.212 2.1.2	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi		%	1	1	1	1	1	1					
IKSK.8.212 2.1.3	Persentase lembaga zakat yang dibina		%	1	1	1	1	1	1					
SK.8.2122 2	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf													
IKSK.8.212 2.2.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina		%	1	1	1	1	1	1					
IKSK.8.212 2.2.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	5,00	10,00	10	10,00	10,00	10,00					
IKSK.8.212 2.2.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	5	10	10	10	10	10					
SK.8.2122 3	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi umat													
IKSK.8.212 2.3.1	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah		%	2,00	2,00	6,00	12,00	14,00	15,00					
IKSK.8.212 2.3.2	Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan		%	20,00	20,00	40,00	50,00	50,00	60,00					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

2123-Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan agama Islam	235	258	284	312	344	Bidang Bimas Islam
SK.8.2123. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama						
1						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.212 3.1.2	Persentase penyuluh agama yang dibina		%	30	30	30	50	50	50						
IKSK.8.212 3.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	0	0	0	0	0	0						
IKSK.8.212 3.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	30	30	50	50	50	50						
SK.8.2123 2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama														
IKSK.8.212 3.2.1	Percentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama		%	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00						
IKSK.8.212 3.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang		Lokasi	1	1	1	2	2	2						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	diselenggarakan													
SK.8.2123.3	Persentase Penyuluhan Agama yang berwawasan moderat													
IKSK.8.2123.3.1	Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat		%	75	75	80	90	90	100					
SK.8.2123.4	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik													
IKSK.8.2123.4.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	0	0	0	0	0	0					
SK.8.2123.5	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat													
IKSK.8.2123.5.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	1	1	1	1	1	1					
SK.8.2123.6	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi													
IKSK.8.2123.6.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleransi (hari besar keagamaan)		Kegiatan	1	1	1	1	1	1					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

SK.8.2123	7	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.8.212	3.7.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1							
SK.8.2123	8	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama														
IKSK.8.212	3.8.1	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00							
2124-Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah											271	298	328	360	397	Bidang Bimas Islam

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.8.212 4.3.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodeifikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	0	0	0	0	0	0						
IKSK.8.212 4.3.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	0	0	0	10	20	30						
SK.8.2124. 4	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.8.212 4.4.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	150	150	200	200	300	300						
IKSK.8.212 4.4.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eks	2	2	2.5	5	7	10						
IKSK.8.212 4.4.3	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	40	40	70	90	150	200						
IKSK.8.212 4.4.4	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	500	500	600	700	800	900						
IKSK.8.212 4.4.5	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang terbina		Orang	30	30	30	40	50	50						
IKSK.8.212	Jumlah POB yang memenuhi standar		Lokasi	0	0	1	1	1	1						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.8.212 5.1.1	Percentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	50,00	50,00	64	76,00	82,00	89,00						
SK.8.2125 2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi														
IKSK.8.212 5.2.1	Percentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00						
IKSK.8.212 5.2.2	Percentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00						
SK.8.2125 3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja														
IKSK.8.212 5.3.1	Percentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	100,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Kriteria dan Standar Program									
IKSK.7.212 7.1.1	Persentase siswa muslim di sekolah yang memperoleh Pendidikan Agama Islam bermuatan moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	
IKSK.7.212 7.1.2	Persentase guru Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama		%	-	-	-	-	-	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	minimal S1													
SK.7.2127.5	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan													
IKSK.7.2127.5.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Daerah Khusus (3T) yang mendapat tunjangan khusus		%	-	-	-	-	-	-	-				
SK.7.2127.6	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan													
IKSK.7.2127.6.1	Persentase guru Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	-	-	-	-	-	-	-				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.212 7.6.2	Percentase pengawas Pendidikan Agama Islam yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama		%	-	-	-	-	-	-	1.803	1.983	2.181	2.399	2.639	Bidang PAKIS
2128-Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam															
SK.7.2128 1	Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama														
IKSK.7.212 8.1.1	Percentase pesantren yang berwawasan moderat		%	NA	0,25	0,40	0,42	0,43	0,45						
IKSK.7.212 8.1.2	Percentase peningkatan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-		%	2	3	3.5	4	4.5	5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	Qur'an													
SK.7.2128.2	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata kuliah agama													
IKSK.7.2128.2.1	Percentase mahasiswa Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	0	0	0,002	0,0012	0,022					
IKSK.7.2128.2.2	Percentase dosen Ma'had Aly yang dibina dalam moderasi beragama		%	NA	0	0	0,005	0,006	0,008					
SK.7.2128.3	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir													
IKSK.7.2128.3.1	Percentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan kurikulum yang berlaku		%	-	-	-	-	-	-					
SK.7.2128.4	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif													
IKSK.7.2128.4.1	Percentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	inovatif dalam kurikulum													
SK.7.2128.5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan													
IKSK.7.2128.5.1	Persentase ustaz pada pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi		%	-	-	-	-	-	-					
IKSK.7.2128.5.2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.212 8.5.3	Percentase Kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.212 8.5.4	Percentase ustadz pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMP Pola PKB dan AKG		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.212 8.5.5	Percentase dosen Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	NA	0	0	0,05	0,06	0,08						
IKSK.7.212 8.5.6	Percentase tenaga kependidikan Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan		%	NA	0	0	0,05	0,06	0,08						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	kompetensi													
SK.7.2128.6	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan													
IKSK.7.2128.6.1	Persentase ustaz pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	-	-	-	-	-	-	-				
SK.5.2128.7	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran													
IKSK.7.2128.7.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-	-				
SK.7.2128.8	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan													
IKSK.7.2128.8.1	Persentase Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	-	-	-	-	-	-	-				
IKSK.7.2128.8.2	Persentase Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	-	-	-	-	-	-	-				
IKSK.7.2128.8.3	Persentase Ulya yang memenuhi SPM sarana		%	-	-	-	-	-	-	-				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

8.13.4	Aly yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional														
SK.7.2128. 14	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKS.K.7.212 8.14.1	Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.212 8.14.2	Percentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128. 15	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan														
IKSK.7.212 8.15.1	Jumlah organisasi siswa pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.212 8.15.2	Jumlah gugus pramuka pada pendidikan diniyah/ muadalah yang dibina		Unit	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2128. 16	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.7.212	Jumlah Guru/Instruktur pada Program		Orang	NA	2	4	6	7	9						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.212 9.3.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum		%	40	45	60	65	90	95						
SK.7.2129 4	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKSK.7.212 9.4.1	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	NA	100	100	100	100	100						
SK.7.2129 5	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKSK.7.212 9.5.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	2	3	5	10	15	30						
IKSK.7.212 9.5.2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK		%	3	5	9	10	15	30						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	untuk e-pembelajaran												
SK.7.2129.6	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan												
IKSK.7.2129.6.1	Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	68	69	70	71	72	73				
IKSK.7.2129.6.2	Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	70	72	75	78	80	82				
IKSK.7.2129.6.3	Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	78	80	81	82	84	85				
IKSK.7.2129.6.4	Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	79	80	83	85	87	89				
IKSK.7.2129.6.5	Persentase Madrasah di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	55	60	61	62	63	65				
SK.7.2129.7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat												
IKSK.7.2129.7.1	Jumlah siswa MI penerima BOS		Orang	24079	24079	25283	26547	27874	29268				
IKSK.7.2129.7.2	Jumlah siswa MTs penerima BOS		Orang	38269	38269	40182	42192	44301	46516				
IKSK.7.2129.7.3	Jumlah siswa MA penerima BOS		Orang	19772	19772	20761	21799	22889	24033				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKS.K.7.212	Persentase siswa 9.7.4 MI penerima PIP		%	22	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5						
IKS.K.7.212	Persentase siswa 9.7.5 MTs penerima PIP		%	25	24	24	24	24	24						
IKS.K.7.212	Persentase siswa 9.7.6 MA penerima PIP		%	21	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

11																	
IKSK.7.212 9.11.1	Percentase madrasah yang menerapkan budaya mutu			%	-	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.212 9.11.2	Percentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional			%	-	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129 12	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan sumber dana dan anggaran pendidikan																
IKSK.7.212 9.12.1	Percentase Madrasah yang mendapatkan Pelatihan Sistem e-RKAM			%	-	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129 13	Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan																
IKSK.7.212 9.13.1	Percentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran			%	-	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.212 9.13.2	Percentase Madrasah Ramah Anak			%	-	-	-	-	-	-	-						
SK.7.2129 14	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan																
IKSK.7.212 9.14.1	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan			Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.213 3.5.1	Percentase Guru pada Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.213 3.5.2	Percentase Tenaga Kependidikan Madrasah Daerah Khusus (3T) yang mendapat Tunjangan Khusus		%	-	-	-	-	-	-						
SK.7.213 6	Meningkatnya kualitas pendidik vokasi														
IKSK.7.213 3.6.1	Jumlah Guru MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi		Orang	-	-	-	-	-	-						
2135-Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam										20.3					Bidang Pendidikan

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Kinerja dan Penilaian 22 Program											37					Madrasah
SK.7.2135.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal															
IKSK.7.213 5.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70	73	75	78	80	81							
SK.7.2135.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.7.213 5.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.7.213 5.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	-	-	-	-	-	-							
SK.7.2135.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja															
IKSK.7.213 5.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	-	-	-	-	-	-							
IKSK.7.213 5.3.2	Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		%	-	-	-	-	-	-							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.7.213 5.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK.7.2135 4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern																								
IKSK.7.213 5.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko audit yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.7.213 5.4.2	Percentase data pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	88	90	91	92	93	95						
SK.7.2135 5	Meningkatnya ASN yang profesional														
IKSK.7.213 5.5.1	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	-	-	-	-	-	-						
IKSK.7.213 5.5.2	Percentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	-	-	-	-	-	-						
2136-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen										847	931	1.024	1.127	1.240	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.9.2136 1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama														
IKSK.9.21	Percentase siswa di SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang		%	10	10	10	10	10	10						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Kinerja dan Persepsi Terhadap Program									
36.1.1		memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama							
IKSK.9.21 36.1.2	Persentase guru SDTK/ SMPTK/SMTK/SM AK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20
IKSK.9.21 36.1.4	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SDTK/ SMPTK/SMTK/SMA K yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	10	10	10	10	10	10
IKSK.9.213 6.1.5	Persentase siswa beragama Kristen di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Kristen bermuatan moderasi beragama		%	70	71	72	73	74	75
IKSK.9.213 6.1.6	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	21	21	21	21	21	21
IKSK.9.213 6.1.7	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam		%	10	10	10	10	10	10

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.9.213 6.6.1	Persentase SDTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.213 6.6.2	Persentase SMPTK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	10	10	10	10	10	10						
IKSK.9.213 6.6.3	Persentase SMTK/SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	10	10	10	10	10	10						
SK.9.213 7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.9.213 6.7.1	Jumlah siswa SDTK penerima BOS	Orang	81	81	79	90	90	90						
IKSK.9.213 6.7.2	Jumlah siswa SMPTK penerima BOS	Orang	35	35	45	45	45	45						
IKSK.9.213 6.7.3	Jumlah siswa SMTK/ SMAK penerima BOS	Orang	151	151	174	174	174	174						
IKSK.9.213 6.7.4	Persentase siswa SDTK penerima PIP	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.9.213 6.7.5	Persentase siswa SMPTK penerima PIP	%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.9.213 6.7.6	Persentase siswa SMTK/ SMAK	%	100	100	100	100	100	100						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	penerima PIP															
SK.9.2136. 8	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal															
IKSK.9.213 6.8.1	Percentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,0 0	50	50	50	50	50							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.213 6.8.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50	50	50	50	50						
SK.9.2136 9	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.9.213 6.9.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Kristen yang mengikuti PPG		%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
SK.9.2136 12	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter														
IKSK.9.213 6.12.1	Percentase SMPTK/SMTK/SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5						
SK.9.2136 13	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan														
IKSK.9.21 36.13.1	Percentase SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	2 5	25	25	25	25	25						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUA N	..ASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.213 7.2.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Kristen		%	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.9.213 7.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Kristen yang diselenggarakan		Lokasi	34	34	34	34	34	34						
SK.9.213 3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama														
IKSK.9.213 7.3.1	Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SK.9.213 4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran														
IKSK.9.213 7.4.1	Persentase rumah ibadah yang ramah		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.9.213 7.4.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	2,00	2,00	5,00	6,00	8,00	9,00						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

SK.9.2137. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik													
5													
IKSK.9.213 7.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1				
SK.9.2137. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama													
6			Kegiatan	35	35	35	35	35	35				
IKSK.9.213 7.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, dll)												
SK.9.2137. Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama													
7													
IKSK.9.213 7.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi, kodefikasi, dan didigitalisasi		Dokumen	10	10	10	10	10	10				
IKSK.9.213 7.7.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina		Orang	50	50	50	50	50	50				
SK.9.2137. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat													
8													
IKSK.9.213 7.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	5	5	5	5	5	5				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.9.213 7.10.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	1	1	1	1	1	1						
IKSK.9.213 7.10.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eks	50	50	50	50	50	50						
IKSK.9.213 7.10.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00						
SK.9.2137 11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga														
IKSK.9.213 7.11.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani		Pasang	35	35	35	35	35	35						
SK.9.2137 12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan kristen														
IKSK.9.213 7.12.1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan kristen yang berpartisipasi		Lembaga	5	5	5	5	5	5						

	dalam pembinaan keagamaan																			
2138-Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen															2.28	2.508	2.758	3.034	3.338	Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.9.2138.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal																			
IKSK.9.213 8.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan		%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00										
SK.9.2138.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi																			
IKSK.9.213 8.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
IKSK.9.213 8.2.2	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
SK.9.2138.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja																			
IKSK.9.213 8.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00										
IKSK.9.213 8.3.2	Persentase		%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00										

	penyerapan anggaran dan pencapaian <i>output</i> belanja													
IKSK.9.213	Persentase nilai 8.3.3 Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.9.2138	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	4													
IKSK.9.213 8.4.1	Percentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%	30	30	40	50	60	70						
IKSK.9.213 8.4.2	Percentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%	50	50	50	50	50	50						
SK.9.2138	Meningkatnya ASN yang profesional	5													
IKSK.9.213 8.5.1	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	80	80	80	80	80	80						
IKSK.9.213 8.5.2	Percentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	80	80	80	80	80	80						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

2139-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik											215	237	260	286	315	Pembimbing Masyarakat Katolik
SK.10.213 9.1	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama															
IKSK.10.21 39.1.1	Percentase siswa SMAK yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10							
IKSK.10.21 39.1.2	Percentase guru SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	20	20	20	20	20	20							
IKSK.10.21 39.1.3	Percentase pengawas SMAK yang dibina dalam moderasi beragama		%	10	10	10	10	10	10							
IKSK.10.21 39.1.4	Percentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100							
IKSK.10.21 39.1.5	Percentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama		%	25	25	50	75	85	100							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

			%	10	20	25	30	35	40					
IKSK.10.21 39.1.6	Persentase siswa beragama Katolik di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama Katolik bermuatan moderasi beragama													
IKSK.10.21 39.1.7	Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada SMAK yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	0	0	0	0	0	0					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.10.213 9.2	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan														
IKS.K.10.21 39.2.1	Percentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi		%	0	0	0	0	0	0						
SK.10.213 9.3	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran														
IKS.K.10.21 39.3.1	Percentase SMAK yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
IKS.K.10.21 39.3.2	Percentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0						
SK.10.213 9.4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan														
IKS.K.10.21 39.4.1	Percentase Taman Seminari yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	0	0	0	0	0	0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.10.21 39.4.2	Persentase SMAK yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	0	0	0	0	0	0					
IKSK.10.21 39.4.3	Persentase SMAK di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	0	0	0	0	0	0					
SK.10.213 9.5	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.10.21 39.5.1	Jumlah siswa SMAK penerima BOS		Orang	0	0	0	0	0	0					
IKSK.10.21 39.5.2	Persentase siswa SMAK penerima PIP		%	0	0	0	0	0	0					
IKSK.10.21 39.5.3	Jumlah SMAK yang didirikan di daerah afirmasi		Lembaga	NA	NA	0	0	0	0					
SK.10.213 9.6	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah													
IKSK.10.21 39.6.1	Jumlah Taman Seminari yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Lembaga	0	0	0	0	0	0					
SK.10.213 9.7	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal													
IKSK.10.21 39.7.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	50,00	50,00	50	50	50	50					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.21 39.8.1	Persentase Guru SMAK yang mengikuti PPG		%	NA	NA	0	0	0	0						
IKSK.10.21 39.8.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Katolik yang mengikuti PPG		%	NA	NA	15	30	30	30						
IKSK.10.21 39.8.3	Persentase Calon Pengawas dan Kepala SMAK yang menerima beasiswa S2		%	NA	NA	0	0	0	0						
SK.10.213 9.9	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi berdasarkan hasil pemetaan														
IKSK.10.21 39.9.1	Jumlah SMAK yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi		Lembag a	0	0	0	0	0	0						
SK.10.213 9.10	Meningkatnya budaya mutu pendidikan														
IKSK.10.21 39.10. 1	Persentase kepala SMAK yang menerapkan budaya mutu		%	0	0	0	0	0	0						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.10.21 39.10. 2	Persentase siswa SMAK yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	0	0	0	0	0	0							
SK.10.213 9.11	Meningkatnya jumlah pendidikan keagamaan yang melaksanakan program pendidikan karakter															
IKSK.10.21 39.11. 1	Persentase SMAK yang melaksanakan program pendidikan karakter		%	0	0	0	0	0	0							
SK.10.213 9.12	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan															
IKSK.10.21 39.12. 1	Persentase SMAK yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	0	0	0	0	0	0							
IKSK.10.21 39.12. 2	Persentase SMAK Ramah Anak		%	0	0	0	0	0	0							
SK.10.213 9.13	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan															
IKSK.10.21 39.13. 1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada SMAK yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Kegiatan	0	0	0	0	0	0							
IKSK.10.21 39.13. 2	Jumlah gugus pramuka pada SMAK yang dibina		Unit	0	0	0	0	0	0							
2140-Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik										450	495	544	598	658	Pembimbing Masyarakat Katolik	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

SK.10.214 0.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Katolik												
IKS.K.10.21 40.1.1	Nilai kinerja penyuluhan agama			Nilai	100	100	100	100	100				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.21 40.1.2	Persentase penyuluhan agama yang dibina		%	100	100	100	100	100	100						
IKSK.10.21 40.1.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	0	0	0	0	0	0						
IKSK.10.21 40.1.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan		Kelompok	50	50	50	50	50	50						
SK.10.214 0.2	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama Katolik														
IKSK.10.21 40.2.1	Percentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama Katolik		%	15	15	35	50	75	100						
IKSK.10.21 40.2.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama Katolik		Kegiatan	19	19	19	19	19	19						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	yang diselenggarakan													
SK.10.214 0.3	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama													
IKSK.10.21 40.3.1	Percentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
SK.10.214 0.4	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran													
IKSK.10.21 40.4.1	Percentase rumah ibadah yang ramah		%	5,00	4,77	35,00	55,00	75,00	100,00					
IKSK.10.21 40.4.2	Percentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	NA	NA	5	5	8	9					
SK.10.214 0.5	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik													
IKSK.10.21 40.5.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		Lokasi	1	1	1	1	1	1					
SK.10.214 0.6	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama													
IKSK.10.21 40.6.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparani, dll)		Kegiatan	1	1	1	1	1	1					
SK.10.214 0.7	Meningkatnya kualitas literasi khazanah budaya bernafas agama													
IKK.10.214 0.7.1	Jumlah Direktori Pustaka Agama yang diinventarisasi,		Dokumen	NA	NA	8	15	25	38					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	BASE LINE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.21 40.8.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)		Unit	NA	NA	8	15	25	38						
SK.10.214 0.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi														
IKSK.10.21 40.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)		Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
SK.10.214 0.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan														
IKSK.10.21 40.10. 1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	NA	NA	38	38	38	38						
IKSK.10.21 40.10. 2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan		Eks	10	5	20	20	20	20						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	yang disediakan															
IKSK.10.21 40.10. 3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	15,00	15,00	35,00	55,00	70,00	100,00							
SK.10.214 0.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga															
IKSK.10.21 40.11. 1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia		Pasang	3	805	3.387	4.808	4	7							
SK.10.214 0.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dana sumbangan keagamaan katolik															
IKSK.10.21 40.12. 1	Jumlah lembaga sumbangan keagamaan Katolik yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	1	1	1	1	1	1							
2141-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik										600	660	726	799	879	Pembimbing Masyarakat Katolik	
SK.10.214 1.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi															
IKSK.10.21 41.2.1	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
IKSK.10.21 41.2.	Persentase produk hukum pengawasan yang diharmonisasikan/ diterbitkan		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

1.5																		
IKSK.10.21 41.5.1	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	NA	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00									
IKSK.10.21 41.5.2	Percentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	75	80	85	90	95	100									
5102-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik													436	479	527	580	638	
SK.10.510 2.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan																Pembimbing Masyarakat Katolik	
IKSK.10.51 02.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Dokumen	3	3	3	3	3	3									
IKSK.10.51 02.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	50	50	50	50	50	50									
IKSK.10.51 02.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	50	50	50	50	50	50									
IKSK.10.51 02.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Dokumen	0	0	0	0	0	0									
2142-Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu													1.542	1.697	1.866	2.053	2.259	Pembimbing Masyarakat

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

									Hindu
SK.11.214	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama								

2.1

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

SK.11.214 Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran								
2.5								
IKSK.11.21 42.5.1	Percentase Adhi Widya Pasraman/Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA			
IKSK.11.21 42.5.2	Percentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	NA	NA			
SK.11.214 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan								
2.6								
IKSK.11.21 42.6.1	Percentase Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%					
IKSK.11.21 42.6.2	Percentase Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%					
IKSK.11.21 42.6.3	Percentase Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.11.21 42.6.4	Percentase Anak Widya Pasraman/Madyama Widya 42.6.4 Pasraman/Utama Widya Pasraman di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%												
SK.11.214 2.7	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat													
IKSK.11.21 42.7.1	Jumlah siswa Adhi Widya Pasraman penerima BOS		Orang	14	54	54	69	84	99					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	daerah afirmasi													
SK.11.214 2.8	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah													
IKSK.11.21 42.8.1	Jumlah siswa Pratama Widya Pasraman yang tingkatkan mutunya melalui BOP		Orang											
SK.11.214 2.9	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal													
IKSK.11.21 42.9.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%											
IKSK.11.21 42.9.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%											
SK.11.214 2.10	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan													
IKSK.11.21 42.10.	Persentase Guru Adhi Widya Pasraman/ 1 Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang mengikuti PPG		%											
IKSK.11.21 42.10.	Persentase Guru Pendidikan Agama		%	65	75	80	85	90	95					

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

SK.11.214 3.9	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi										
IKSK.11.21 43.9.1	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan, sekaten, dll)		Kegiatan	2	Na	3	3	1	1		
SK.11.214 3.10	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan										
IKSK.11.21 43.10. 1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan		Unit	7	7	9	10	12	14		
IKSK.11.21 43.10. 2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan		Eksemplar								
IKSK.11.21 43.10. 3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%								
SK.11.214 3.11	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga										
IKSK.11.21 43.11. 1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah		Pasan gan	1	1	2	4	6	6		
SK.11.214 3.12	Meningkatnya pemberdayaan lembaga dharma dana										
IKSK.11.21 43.12. 1	Jumlah lembaga dharma dan yang berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan		Lembaga	NA	NA	1	1	1	1		

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

2144-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	906	997	1.09	1.20	1.32	Pembimbing Masyarakat
SK.11.214 Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 4.1	7	6	7	6	7	

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	pencapaian <i>output</i> belanja													
IKSK.11.21 44.3.4	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya		%											
SK.11.214 4.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern													
IKSK.11.21 44.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel		%											
IKSK.11.21 44.4.2	Persentase data bidang agama dan pendidikan yang komprehensif, valid dan reliabel		%											
SK.11.214 4.5	Meningkatnya ASN yang profesional													
IKSK.11.21 44.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	1	1	1	1	1	1					
IKSK.11.21 44.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	1	1	1	1	1	1					

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATU AN	B0..AS ELIN E 2019	TAR GET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	2022	2023	202 4	

IKSK.12.40 12.2.1	Persentase Nava Dhammadsekhya yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50	50	50	50	50	50						
IKSK.12.40 12.2.2	Persentase Nava Dhammadsekhya di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	50	55	60	65	70	75						
IKSK.12.40 12.2.3	Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammadseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	50	55	60	65	70	75						
SK.12.401 2.3	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah														
IKSK.12.40 12.3.1	Jumlah Nava Dhammadsekhya yang tingkatkan		Lemb aga	2	2	2	2	2	2						

	mutunya melalui BOP														
SK.12.401 2.4	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal														
IKSK.12.40 12.4.1	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	55	60	65	70	75	80						
IKSK.12.40 12.4.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	55	60	65	70	75	80						
SK.12.401 2.5	Meningkatnya kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan														
IKSK.12.40 12.5.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengikuti PPG		%	20	20	20	20	20	20						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATU AN	B0..AS ELIN E 2019	TAR GET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	5105-Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha									1.51	1.66	1.8	2.0	2.21	Pembimbing Masyarakat
SK.12.510 5.1	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan									1.51	1.66	1.8	2.0	2.21	
IKSK.12.51 05.1.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian		Doku men	5	5	5	5	5	5						
IKSK.12.51 05.1.2	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan		Unit	3	3	3	3	3	3						
IKSK.12.51 05.1.3	Jumlah layanan umum dan perlengkapan		Unit	5	5	5	5	5	5						
IKSK.12.51 05.1.4	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		Doku men	35	40	45	50	55	60						
2147-Pelayanan Haji Dalam Negeri										128	140	154	170	187	B
SK.6.2147 1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji														
IKSK.6.214 7.1.1	Persentase pusat		%	10	10	16	25	35	48						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

	layanan haji yang memenuhi standar pelayanan														
IKSK.6.214 7.1.2	Percentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	10	10	16	25	35	48						
SK.6.2147 2	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji														
IKSK.6.214 7.2.1	Percentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		%	13	13	16	20	25	30						
IKSK.6.214 7.2.2	Percentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu		%	80	80	85	86	87	87.5						
2148-Pembinaan Haji										755	831	914	1.00	1.10	B
SK.6.2148 1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji														
IKSK.6.214 8.1.1	Percentase petugas haji yang profesional		%	87	87	87	87	87	88						
IKSK.6.214 8.1.2	Percentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		%	93	93	94	94.5	95	96						
IKSK.6.214 8.1.3	Percentase kasus jemaah haji yang terselesaikan		%	65	65	65	70	80	90						
IKSK.6.214 8.1.4	Jumlah advokasi haji yang terselenggara		Kegiatan	30	30	30	30	30	30						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

IKSK.6.214 8.1.5	Persentase pembimbing haji yang bersertifikat		%	80	80	81	82	84	88										
2149-Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu											-	33	34	35	35				

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	LOKA SI	SATU AN	B0..AS ELIN E 2019	TAR GET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.6.2149.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel														
IKSK.6.2149.1.1	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji		%	90	90	90	92	93	95						
SK.6.2149.2	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu														
IKSK.6.2149.2.1	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)		%	86	86	90	96	97	99						
IKSK.6.2149.2.2	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji		Nilai	68	68	70	73	75	80						
2150-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah										3.25	3.575	3.933	4.326	4.759	Bidang PHU
SK.6.2150.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal														
IKSK.6.2150.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang		%	50	50	60	70	80	83						

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

Matrik Kinerja dan Pendanaan 12 Program

PROGR AM/ KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASA RAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	LOKA SI	SATU AN	B0..AS ELIN E 2019	TAR GET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					PENANGG UNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.6.215 0.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	68,00	68	70	72	73	77						
IKSK.6.215 0.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya		%	70,00	70	75	76	79	81						

